



SMAN 3 YOGYAKARTA PROUDLY PRESENTS TRYOUT SUPERMAN SIMULASI PELAJAR KEREN ANTI-NYONTEK



25 & 26
FEBRUARI 2023

1600 PESERTA

55K



FACILITIES : Soal TRY OUT,
GOODY BAG, KONSUMSI,
EKSHIBISI EKSTRAKURIKULER,
SCHOOL TOUR + MANY OTHER MORE

REGISTER NOW !



eventpadz.com
Dien (082137609530)



SMAN 3
YOGYAKARTA
TALKSHOW FT :



ESTHER NATALIA
CEO & FOUNDER
OF PRODUKTIFKUY



FARHAN JIJIMA



DOORPRIZE SEPEDA AND MANY OTHER PRIZES
UP TO RP5.000.000+
TOTAL HADIAH PEMENANG JUTAAN RUPIAH!



SPONSORED BY :



SUPPORTED BY :



MEDIA PARTNER :



47 POLRES RAIH PREDIKAT PELAYANAN PRIMA Publik Jadi Mata Pengawas Polri

JAKARTA (KR) - Sebanyak 47 Polres/Polresta/Polrestabes dan Polres Metro meraih predikat Pelayanan Prima Tahun 2022 dari evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Capaian ini meningkat dibanding tahun 2021 yang tercatat sebanyak 27 Polres/Polresta/Polrestabes dan Polres Metro yang mendapat predikat Pelayanan Prima, sedangkan tahun 2020 hanya ada 12.

Hal ini disampaikan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam acara Kilas Balik Evaluasi Pelayanan Lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Tahun 2022 di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/2). Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan Penghargaan Pelayanan Kategori Pelayanan Prima dan Predikat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polri Tahun 2022. Selain Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, acara ini juga dihadiri jajaran terkait. "Dari hasil evaluasi, 47 Polres/

Polresta/Polrestabes dan Polres Metro yang mendapat Pelayanan Prima. Hasil ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni tahun 2021 ada 27 Polres dan 2020 ada 12 Polres," katanya.

Azwar Anas menjelaskan, predikat ini diperoleh berdasarkan hasil nilai indeks pelayanan publik lingkup Polri yang dilakukan Kementerian PAN-RB dari periode Juli sampai November 2022.

Penilaian dilakukan terhadap 332 Polres/Polresta/Polrestabes, dan Polres Metro se-Indonesia dengan fokus pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). "Pada tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi diperoleh nilai indeks pelayanan publik lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro sebesar 3,88 yang termasuk Kategori B atau Baik dan indeks ini merupakan rata-rata dari indeks pelayanan SIM sebesar 3,92 dan SKCK 3,85," kata Menteri PAN-RB. Ia menyampaikan, secara umum ni-

lai indeks pelayanan publik lingkup Polri tahun ini meningkat dari tahun 2021 dengan capaian nilai indeks 3,57 persen. "Tentu kami sangat berharap sesuai harapan Presiden, peningkatan indeks ini harapan kami sejalan juga dengan peningkatan kepuasan rakyat terhadap pelayanan Polri dan Pemerintah secara umum," katanya.

Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan, Polri dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan di dalam negeri, menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta mengayomi dan melayani masyarakat tidak dapat terlepas dari peran dan partisipasi publik. "Publik memberikan legitimasi kepada Polri. Publik menjadi mata pengawas Polri agar terus menjadi institusi yang transparan dan akuntabel. Publik pula yang membantu kelancaran kerja Polri," kata Wapres.

"Semoga melalui pemberian penghargaan ini menjadi penyemangat kami meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri," kata Kapolri. (Ant/San)-d

Lembaga Pengelola Zakat Jangan Berpolitik

JAKARTA (KR) - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengingatkan para pengelola zakat untuk tidak terpengaruh dinamika politik, baik lokal maupun nasional. Pesan ini disampaikan Wamenag saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat di Jakarta, Selasa (21/2).

Rakornas berlangsung tiga hari, mengangkat tema 'Menguatkan Kolaborasi dan Sinergi Program Maslahat Keagamaan Umat'. Kegiatan yang digelar Ditjen Bimas Islam ini diikuti Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Pimpinan Baznas Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pimpinan Lembaga Amil Zakat, dan para Pimpinan Asosiasi dan Perkumpulan para Pengelola Zakat.

"Saya mengingatkan kita semua bahwa kinerja dan fokus kerja Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dalam melayani umat tidak boleh terpengaruh dengan dinamika politik lokal dan nasional. Baznas dan LAZ wajib menegakkan prinsip imparialitas dalam pengelolaan dana umat," tegas Wamenag.

Ia berharap Baznas Pusat dan Daerah serta LAZ memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola zakat yang amanah, transparan dan akuntabel. Pengelolaan zakat memerlukan harmon-

isasi pengaturan dan standarisasi sistem pengawasan sebagai komponen esensial dalam penguatan tata kelola zakat nasional.

Dijelaskan Wamenag, Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga pengelola zakat terbanyak di antara negara-negara lain. Kondisi dimaksud menjadi kekuatan transformatif dalam pembangunan umat dan sekaligus tantangan dalam menjaga spirit kerja sama dalam tataran aksi Gerakan Zakat Nasional.

"Seperti kita tahu, zakat adalah sektor sosial keuangan syariah yang memiliki tempat dan peran cukup signifikan. Kontribusi zakat tidak cukup hanya sekadar dihitung, tapi diharapkan ke depan lebih diperhitungkan dalam pembangunan bangsa," tuturnya.

Wamenag mengajak semua pihak untuk lebih progresif mengimplementasikan tata kelola zakat melalui lembaga resmi yang mengemban mandat agama dan negara. "Para pegiat zakat, termasuk institusi Pemerintah sebagai regulator dan pengawas harus memastikan kualitas pelayanan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan mengatasi masalah sosial kemanusiaan," sambungnya. (Ati)-d